

GENERASI MUDA DAN HAM: PERAN MAHASISWA
DALAM MENJAGA HAK UNIVERSALAhmad Arif Fadilah¹, Muhammad Luthfi², Wanda Adwi Kurnia³

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Indonesia

Email : Arif.fadilah@umt.ac.id, mhmmadluthfi180@gmail.com, wandaadwi03@gmail.com**Abstract**

The younger generation plays a very important role in maintaining and promoting human rights (HAM), which are the main pillars of a just and dignified life. This study aims to analyze the contribution of students as part of the younger generation in maintaining and fighting for universal rights in various aspects of life, both in the social, political, and cultural realms. Using a qualitative approach, this study applies a descriptive-analytical method. Data were collected through literature studies, in-depth interviews, and analysis of relevant documents, including national and international policies related to human rights. The research findings reveal that students act as agents of change through human rights advocacy, public education, and involvement in social movements that support the protection of the rights of minorities and vulnerable groups. Furthermore, students also have a moral responsibility to increase collective awareness of the importance of human rights, especially amidst global dynamics that often present challenges in the form of human rights violations and social injustice. Therefore, the implication of this study is the need to strengthen human rights education at the university level and the formation of human rights-based communities to optimize students' contributions in creating an inclusive and just society. Thus, students as the younger generation have great potential to become pioneers of sustainable change in maintaining universal rights.

Keyword: Human Rights Advocacy**Abstrak**

Generasi muda memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM), yang merupakan pilar utama dari kehidupan yang adil dan bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak universal di berbagai aspek kehidupan, baik di ranah sosial, politik, maupun budaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, serta analisis dokumen yang relevan, termasuk kebijakan nasional dan internasional yang berkaitan dengan HAM. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa berperan sebagai agen perubahan melalui advokasi HAM, edukasi masyarakat, serta keterlibatan dalam gerakan sosial yang mendukung perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Lebih lanjut, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya HAM, terutama di tengah dinamika global yang sering kali menghadirkan tantangan berupa pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan pendidikan HAM di tingkat perguruan tinggi dan pembentukan komunitas berbasis HAM untuk mengoptimalkan kontribusi mahasiswa dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan demikian, mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor perubahan yang berkelanjutan dalam menjaga hak-hak universal.

Kata kunci: Advokasi Hak Asasi Manusia**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No

234.735.6180

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk mengadvokasi hak-hak universal dan menyuarakan keadilan sosial. Sejarah mencatat bahwa mahasiswa sering kali berada di garis depan dalam perjuangan untuk hak asasi manusia, terlibat aktif dalam berbagai gerakan sosial dan kampanye yang bertujuan menegakkan keadilan (Hambali et al. , 2024). Di Indonesia, di mana isu-isu HAM masih menjadi tantangan yang kompleks, keterlibatan proaktif mahasiswa sangat diperlukan. Mereka tidak hanya memiliki hak untuk bersuara, tetapi juga kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berkeadilan (Hambali et al. , 2024).

Pendidikan karakter dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai hak asasi manusia sangat penting dalam membangun kesadaran di kalangan mahasiswa. Pendidikan ini dapat membantu mereka berinteraksi dengan masyarakat tanpa melanggar norma dan etika sosial (Putri et al. , 2023). Selain itu, mahasiswa juga perlu diberdayakan dengan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, agar dapat menjadi advokat yang efektif dalam isu-isu HAM (Kembara et al. , 2022).

Kepedulian dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu HAM dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada HAM cenderung memiliki pemahaman lebih baik dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia (Billah et al. , 2023). Dengan demikian, generasi muda, terutama mahasiswa, memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong perubahan positif dalam masyarakat dan penegakan HAM di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian Peran

Peran merujuk pada fungsi atau posisi yang dijalankan seseorang dalam kelompok atau masyarakat. Dalam konteks sosial, peran dapat diartikan sebagai serangkaian harapan, norma, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tertentu. Setiap individu memiliki peran yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, pendidikan, dan konteks budaya.

Menurut Goffman (1959), dalam kehidupan sehari-hari, individu memainkan berbagai peran, dan setiap peran tersebut datang dengan ekspektasi tertentu, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam lingkungan pendidikan, khususnya bagi mahasiswa, peran mereka melampaui sekadar pelajar. Mereka juga berfungsi sebagai agen perubahan yang berkewajiban untuk berkontribusi pada isu-isu sosial, termasuk masalah hak asasi manusia.

Mahasiswa diharapkan dapat aktif dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan, serta menyuarakan hak-hak yang sering kali terabaikan dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran mereka, mahasiswa dapat menjadi pendorong perubahan positif, menjembatani antara teori dan praktik, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memberikan dampak yang signifikan bagi komunitas di sekitar mereka.

Pengertian Peran Mahasiswa

Peran mahasiswa dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari fungsi mereka sebagai agen perubahan sosial. Sebagai kelompok terdidik dan kritis, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi. Secara historis, mereka telah aktif terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan politik, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga reformasi di Indonesia.

Di dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM), mahasiswa berfungsi sebagai pengawas dan kritikus terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar atau tidak adil. Mereka sering kali menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, berperan dalam mengedukasi publik mengenai hak-hak mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

Mahasiswa juga terlibat dalam advokasi dan kampanye kesadaran sosial, memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan massa. Dengan kemampuan analitis yang mereka miliki, mahasiswa dapat mengidentifikasi isu-isu kritis dalam masyarakat, seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran HAM, serta menawarkan solusi yang berbasis penelitian. Selain itu, mereka sering kali aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu-isu HAM, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, yang semakin memperkuat posisi mereka sebagai agen perubahan.

Tidak jarang, mahasiswa menunjukkan keberanian untuk menyuarakan pendapat, meskipun sering kali harus menghadapi penolakan atau tindakan represif dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya terbatas di lingkungan akademis, tetapi juga meluas ke ranah publik, di mana mereka berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan demikian, kontribusi mahasiswa dalam penegakan HAM dan pembangunan sosial sangat vital dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat di Indonesia.

Faktor Yang Mempengaruhi Peran Mahasiswa Terkait HAM

Peran mahasiswa dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Memahami kedua jenis faktor ini sangat penting untuk menangkap dinamika pergerakan mahasiswa dalam konteks HAM.

a. Faktor Internal

Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari diri mahasiswa sendiri, yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam isu-isu HAM.

1. Kesadaran dan Pengetahuan: Tingkat kesadaran mahasiswa mengenai isu-isu HAM memiliki dampak signifikan terhadap peran yang mereka mainkan. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak-hak asasi manusia cenderung lebih aktif dalam mempromosikan dan membela hak-hak tersebut. Pendidikan yang memadai tentang HAM di perguruan tinggi dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mereka.
2. Motivasi dan Kepedulian: Motivasi individu mahasiswa, entah itu untuk memperjuangkan keadilan sosial, mendorong perbaikan dalam masyarakat, atau untuk menyuarakan pengalaman pribadi terkait pelanggaran HAM, menjadi pendorong utama bagi keterlibatan mereka dalam gerakan advokasi. Rasa kepedulian terhadap isu-isu sosial juga memicu dorongan untuk berpartisipasi.

3. Kemampuan Organisasi dan Kepemimpinan: Mahasiswa yang memiliki keterampilan organisasi dan kepemimpinan yang baik dapat memanfaatkan keterampilan tersebut untuk menggerakkan teman-teman mereka dalam kegiatan advokasi. Keterampilan ini biasanya dikembangkan melalui keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan atau komunitas.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencerminkan pengaruh dari lingkungan luar yang dapat membentuk peran mahasiswa dalam advokasi HAM.

1. Konstitusi dan Hukum: Lingkungan hukum yang mendukung HAM berperan krusial dalam peran mahasiswa. Kebijakan pemerintah yang pro-HAM dan keberadaan lembaga hukum yang efektif menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam advokasi. Sebaliknya, lingkungan hukum yang represif dapat membatasi tindakan mahasiswa.
2. Kondisi Sosial dan Politik: Situasi politik dan sosial di suatu negara juga berpengaruh terhadap aktivitas mahasiswa. Dalam situasi ketegangan politik atau saat pelanggaran HAM berlangsung luas, mahasiswa sering kali menjadi garda terdepan dalam gerakan protes. Namun, dalam kondisi yang stabil dan damai, tingkat keterlibatan mereka mungkin menurun.
3. Dukungan dari Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Keberadaan NGO yang berfokus pada HAM dapat memberikan dukungan bagi mahasiswa berupa pelatihan, sumber daya, dan platform untuk menyuarakan isu-isu HAM. Kerjasama dengan NGO dapat meningkatkan efektivitas advokasi mahasiswa.
4. Media dan Teknologi: Perkembangan media sosial dan teknologi informasi terbukti memberikan platform baru bagi mahasiswa untuk menyebarkan informasi dan menyampaikan pendapat mereka mengenai HAM. Akses yang cepat dan luas terhadap informasi memungkinkan mahasiswa untuk lebih responsif terhadap isu-isu terkini.

Kombinasi antara faktor internal dan eksternal ini menciptakan suasana yang memengaruhi peran mahasiswa dalam advokasi HAM. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih efektif dalam berkontribusi terhadap perlindungan dan pengembangan HAM di masyarakat.

Dimensi Peran Mahasiswa

Mahasiswa memainkan peran multifaset dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas. Peran ini dapat dibagi menjadi beberapa dimensi yang saling terkait, yaitu akademis, sosial, dan politik.

1. Dimensi Akademis

Dalam aspek akademis, mahasiswa berfungsi sebagai pelajar yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Diharapkan mereka tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan mengkaji materi yang dipelajari dengan pendekatan kritis. Dalam konteks ini, mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan inovasi.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memberikan perspektif baru dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Dimensi Sosial

Mahasiswa juga memiliki peran yang krusial dalam dimensi sosial, berfungsi sebagai jembatan antara teori yang diperoleh di kampus dan realitas yang ada di masyarakat. Melalui keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, mereka dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan keterampilan interpersonal. Kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, seminar, dan diskusi publik memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mereka berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial serta mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu penting seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan.

3. Dimensi Politik

Dalam dimensi politik, mahasiswa berperan sebagai partisipan aktif dalam proses demokrasi. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik. Melalui aksi demonstrasi, kampanye, dan forum diskusi, mahasiswa dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Peran ini tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus, tetapi juga harus meluas ke masyarakat yang lebih luas. Diharapkan mahasiswa menjadi agen perubahan yang mendorong reformasi dan memperbaiki kualitas demokrasi di negara.

Dimensi peran mahasiswa mencerminkan tanggung jawab mereka dalam menciptakan perubahan positif. Dengan mengintegrasikan aspek akademis, sosial, dan politik, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi mahasiswa, agar mereka dapat menjalankan peran ini dengan baik. Melalui pendekatan yang holistik, mahasiswa tidak hanya akan menjadi individu berpengetahuan, tetapi juga pemimpin masa depan yang berkomitmen terhadap perubahan sosial dan politik.

Pengertian Hak

Hak adalah konsep fundamental yang mencerminkan posisi dan martabat seseorang dalam masyarakat. Secara etimologis, istilah “hak” berasal dari bahasa Arab “huquq” dan bahasa Inggris “rights.” Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari keberadaannya sebagai manusia. Hak dapat dipahami sebagai klaim atau tuntutan yang diakui secara hukum dan moral, yang memberikan kebebasan bagi individu atau kelompok untuk bertindak, berbicara, dan berinteraksi tanpa adanya penindasan atau pembatasan dari pihak lain, termasuk pemerintah.

Dalam ranah hukum, hak dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti hak asasi manusia (HAM), hak sipil, dan hak sosial. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak ini bersifat universal dan inheren, yang berarti tidak dapat dicabut atau diberikan oleh otoritas mana pun. Contoh hak ini meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk

mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. Hak-hak ini diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjadi dasar bagi pengakuan dan perlindungan hak di seluruh dunia.

Lebih lanjut, hak dapat dibedakan menjadi hak positif dan hak negatif. Hak positif merujuk pada kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menyediakan layanan atau perlindungan tertentu kepada warganya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, hak negatif menuntut agar pihak lain, termasuk pemerintah, tidak mengganggu atau melanggar kebebasan individu, seperti hak atas privasi dan kebebasan berbicara.

Pendidikan tentang hak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hak, individu dapat berperan aktif dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka serta hak-hak orang lain. Selain itu, hak juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong keadilan sosial dan mempromosikan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak perlu diperkuat melalui pendidikan formal dan informal, agar setiap individu mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Pengertian Hak Universal

Hak universal adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau status sosial. Konsep ini berlandaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak atas perlakuan yang adil dan setara. Menurut Isra (2014), hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Dalam konteks ini, hak universal mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Pentingnya pengakuan hak universal juga tercermin dalam konstitusi Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak tersebut sebagai komitmen negara terhadap perlindungan HAM (Putra, 2015). Selain itu, Triputra (2017) menekankan bahwa pengakuan hak universal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang hak universal, diharapkan individu dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil serta menghormati martabat setiap orang. Oleh karena itu, pendidikan tentang hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk mendorong kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang seharusnya mereka nikmati.

Faktor Yang Mempengaruhi Hak Universal Dalam HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Namun, pelaksanaan dan pengakuan hak-hak ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

a. Budaya dan Tradisi

Budaya serta tradisi suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan pelaksanaan HAM. Di beberapa negara, norma-norma budaya dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Contohnya, dalam beberapa budaya, hak-hak perempuan sering diabaikan demi menjaga tradisi patriarki. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan pendidikan dan pemahaman tentang HAM yang relevan dengan konteks budaya setempat agar kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat meningkat.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat turut memengaruhi pemahaman mereka tentang HAM. Masyarakat yang berpendidikan cenderung lebih memahami hak-hak mereka dan lebih berani memperjuangkannya. Sebaliknya, masyarakat yang kurang terdidik mungkin tidak menyadari hak-hak yang sepatutnya mereka nikmati dan menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran HAM. Untuk itu, pendidikan mengenai hak asasi manusia harus diperkuat di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

c. Sistem Hukum

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara juga merupakan faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan HAM. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan independen cenderung lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia. Di sisi lain, negara yang memiliki sistem hukum lemah atau korup dapat mengabaikan HAM. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti secara hukum.

2. Faktor Eksternal

a. Globalisasi

Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pelaksanaan HAM di seluruh dunia. Dengan meningkatnya interaksi antara negara, isu-isu HAM menjadi perhatian global. Organisasi internasional seperti PBB aktif mempromosikan dan melindungi HAM, berusaha memberikan tekanan kepada negara-negara agar menghormati hak-hak tersebut. Meski demikian, globalisasi juga dapat menyebabkan pelanggaran HAM, terutama di negara-negara berkembang, di mana perusahaan multinasional mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam dengan mengabaikan hak asasi individu.

b. Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional, termasuk perjanjian dan konvensi HAM, memainkan peran penting dalam memengaruhi pelaksanaan HAM di berbagai negara. Misalnya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memberikan kerangka hukum yang mendorong negara-negara untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Negara yang meratifikasi konvensi ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dalam hukum dan praktik mereka.

c. Perubahan Sosial dan Politik

Perubahan sosial dan politik, seperti revolusi, gerakan sosial, atau perubahan pemerintahan, dapat memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan HAM. Gerakan pro-demokrasi sering kali berhasil meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM. Namun,

perubahan politik yang menghadirkan kekuasaan otoriter dapat berakibat pada pelanggaran HAM yang lebih parah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan hak asasi manusia dihormati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengakuan hak universal dalam HAM sangat kompleks dan saling terkait. Baik faktor internal—seperti budaya, pendidikan, dan sistem hukum—maupun faktor eksternal—seperti globalisasi, kebijakan internasional, dan perubahan sosial-politik—semuanya memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Untuk meningkatkan pelaksanaan HAM, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

Dimensi Hak Universal HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang esensial dalam menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu. Di tingkat global, HAM diakui sebagai hak-hak yang melekat pada setiap orang tanpa kecuali, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Dimensi universal HAM mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mendukung, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Hak sipil dan politik, sebagai salah satu dimensi kunci, memberikan jaminan bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hak-hak ini mencakup kebebasan berekspresi, hak berkumpul, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Konsep ini tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengungkapkan pendapat. Namun, di banyak negara, pelaksanaan hak-hak ini sering menghadapi tantangan, seperti pembatasan kebebasan berbicara dan diskriminasi politik.

Dimensi ekonomi, sosial, dan budaya dari HAM berfokus pada hak-hak yang menjamin kesejahteraan individu dalam kehidupan sehari-hari. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan merupakan bagian integral dari dimensi ini. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, hak atas pendidikan bukan hanya sekadar akses ke pendidikan, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelanggaran terhadap aspek ini dapat menghasilkan ketidakadilan sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan dan tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan adil.

Lebih jauh lagi, dimensi hak universal HAM juga menekankan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu harus diperlakukan setara di hadapan hukum dan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Diskriminasi, baik berdasarkan gender, ras, atau orientasi seksual, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak Anak (CRC), telah disusun untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan pengakuan serta perlindungan hak-hak mereka.

Dalam konteks Indonesia, implementasi hak universal HAM menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, praktik pelanggaran HAM masih berlangsung. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, penahanan semena-mena, dan pelanggaran kebebasan berekspresi, menunjukkan bahwa kesadaran dan penghormatan terhadap HAM masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pendidikan tentang hak asasi manusia menjadi vital untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam perlindungan dan penegakan HAM.

Selanjutnya, dimensi hak universal HAM juga mencakup tanggung jawab negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah pelanggaran HAM dan memberikan sanksi pada pelanggar. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi HAM sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Organisasi non-pemerintah, aktivis HAM, dan individu memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia dan memberikan suara bagi mereka yang terpinggirkan.

Dimensi hak asasi manusia (HAM) mencerminkan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek ini, diharapkan masyarakat akan lebih peka terhadap isu-isu HAM dan termotivasi untuk berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi setiap individu. Penguatan pendidikan HAM, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi adalah langkah-langkah krusial untuk mewujudkan cita-cita hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali peran mahasiswa dalam mempertahankan hak asasi manusia (HAM) universal di kalangan generasi muda. Metode kualitatif dipilih karena mampu menawarkan wawasan mendalam mengenai pengalaman, perspektif, dan tindakan mahasiswa terkait isu-isu HAM. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa universitas di Indonesia, dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan agar dapat mengumpulkan pandangan yang bervariasi.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, FGD). Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, lembaga advokasi HAM, atau kegiatan sosial. Selama wawancara, peneliti berupaya untuk mendalami pemahaman mereka tentang HAM, alasan mereka terlibat dalam isu-isu tersebut, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan hak-hak ini. Setiap wawancara direkam dan kemudian ditranskrip untuk dianalisis lebih lanjut.

Selain wawancara, FGD dilaksanakan untuk menginvestigasi dinamika kelompok serta saling pengaruh antar mahasiswa dalam memandang isu-isu HAM. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk secara kolektif berbagi pengalaman dan pandangan, serta merumuskan strategi yang dianggap efektif dalam mempromosikan kesadaran akan HAM di antara rekan-rekan mereka. FGD juga memberikan gambaran tentang bagaimana mahasiswa saling memotivasi dan mendukung satu sama lain dalam usaha menjaga hak-hak universal.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari transkrip wawancara dan hasil FGD. Proses ini meliputi pengkodean data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu, seperti tingkat kesadaran HAM, bentuk keterlibatan, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, konteks sosial dan budaya yang memengaruhi perspektif mahasiswa terhadap HAM juga menjadi pertimbangan penting dalam analisis ini.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga hak asasi manusia, serta kontribusi mereka dalam meningkatkan kesadaran HAM di kalangan generasi muda. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pendidikan dan advokasi HAM.

HASIL PEMBAHASAN

Generasi Muda dan HAM: Peran Mahasiswa dalam Menjaga Hak Universal

Generasi muda, khususnya para mahasiswa, memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM) di masyarakat. Sebagai agen perubahan, mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu sosial yang kompleks, tetapi juga untuk mengadvokasi nilai-nilai HAM yang bersifat universal. Dengan pendidikan yang mereka peroleh, mahasiswa dilengkapi dengan pengetahuan kritis yang memungkinkan mereka untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait HAM.

Partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kampanye kesadaran, seminar, dan diskusi publik, memberikan mereka platform untuk mengekspresikan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka. Melalui organisasi kemahasiswaan dan komunitas, mahasiswa dapat menggalang dukungan untuk isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Lebih dari itu, mereka juga dapat berperan sebagai pengawas, mengkritisi tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak-hak individu dan kolektif, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya pendidikan HAM di kampus-kampus juga tidak boleh diabaikan. Dengan mengintegrasikan kurikulum yang menekankan nilai-nilai HAM, mahasiswa dapat lebih memahami hak-hak mereka dan hak orang lain, serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Hal ini akan membentuk karakter mereka menjadi pemimpin masa depan yang peka terhadap isu-isu sosial.

Dengan kapasitas yang besar untuk menjadi pendorong perubahan sosial yang positif, generasi muda memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mereka berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Upaya strategi untuk meningkatkan Peran Mahasiswa dalam Menjaga Hak Universal HAM

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Untuk meningkatkan peran tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan terarah.

Pertama, pendidikan tentang hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM, mahasiswa akan lebih menyadari hak-hak mereka dan hak-hak orang lain. Hal ini akan mendorong mereka untuk aktif memperjuangkan dan melindungi HAM dalam masyarakat.

Kedua, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan advokasi dan kampanye HAM adalah langkah yang krusial. Melalui organisasi kemahasiswaan, mereka dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai isu HAM. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan kepemimpinan dan berbicara di depan umum—keterampilan yang sangat penting dalam upaya advokasi.

Ketiga, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu-isu HAM juga sangat penting. Melalui kemitraan ini, mahasiswa dapat mengakses pelatihan, sumber daya, dan jaringan yang diperlukan untuk memperluas jangkauan serta dampak perjuangan mereka. Mereka juga dapat terlibat dalam proyek penelitian atau program pengabdian masyarakat yang mendukung perlindungan HAM.

Keempat, mahasiswa perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran tentang isu-isu HAM. Media sosial, misalnya, dapat berfungsi sebagai platform yang efektif untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM dan membagikan informasi kepada khalayak yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan pendidikan, advokasi, kolaborasi, dan teknologi, mahasiswa dapat berperan lebih efektif dalam menjaga hak asasi manusia serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan peran krusial generasi muda, terutama mahasiswa, dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM) di masyarakat. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memahami isu-isu sosial yang kompleks, tetapi juga untuk aktif dalam advokasi serta pendidikan mengenai HAM. Keterlibatan mereka dalam berbagai gerakan sosial dan kampanye kesadaran menyoroti potensi besar mereka untuk mendorong perubahan positif. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mahasiswa dapat berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta mendukung perlindungan hak-hak kelompok rentan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pendidikan HAM di tingkat perguruan tinggi dan membangun komunitas yang berfokus pada HAM, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi secara maksimal dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Trisnadiwan, R. (2024). KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA TERHADAP ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 15-26.
- Tumanggor, R. O. (2023). PELATIHAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI (STT) CIPANAS. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(4), 1561-1567.
- Naufal, A. F., & Perdana, R. R. (2024). IMPLEMENTASI PERAN MAHASISWA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10), 41-50.
- Ismaidar, I., & Putra, A. H. (2024). Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1894-1905.
- Laoli, C. M. S. (2024, August). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAM YANG SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945 PADA SISWA DI SEKOLAH DASAR. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS* (Vol. 3, No. 1, pp. 525-536).
- Rosidah, N. F. (2023). Upaya Pemerintah dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 786-797.
- Hemafitria, H., & Rohani, R. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI PROGRAM STUDI PPKN IKIP PGRI PONTIANAK. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1), 40-48.
- Triadi, I., & Rahma, A. A. (2024). Pemberdayaan Mahasiswa Sebagai Salah Satu Komponen Dalam Usaha Bela Negara Di Bidang Pencerdasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 01-13.